

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sedang menghadapi tantangan serius dalam sektor perumahan. Data terbaru menunjukkan adanya backlog perumahan sekitar 15.150 unit, yang berarti jumlah kebutuhan hunian yang belum terpenuhi di wilayah ini. Kota Yogyakarta diperkirakan memiliki angka backlog tertinggi, namun Kabupaten Bantul dan Kulon Progo juga menunjukkan potensi besar untuk pengembangan kawasan hunian. Ketua DPD Real estate Indonesia (REI) Ilham Muhammad Nur mengatakan, angka backlog tertinggi kemungkinan besar terjadi di Kota Jogja. Namun selain itu, daerah seperti Kabupaten Bantul masih memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan sebagai kawasan hunian. Di sisi lain, kondisi pasar properti di DIY secara keseluruhan sedang mengalami pelambatan yang cukup signifikan. Ilham disini menyebut, dalam dua bulan terakhir, penjualan properti di DIY menurun drastis hingga mencapai angka 50 persen. Penurunan ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk melemahnya daya beli masyarakat dan kondisi ekonomi yang tidak stabil. Dikutip dari Kompas.com (Bramantyo, 2025).

Hal ini menjadikan tanah sebagai salah satu sumber daya yang sangat penting dan bernilai tinggi, serta semakin sulit diakses oleh masyarakat secara umum. Urbanisasi mendorong pertumbuhan pesat di wilayah perkotaan. Pertumbuhan ini kemudian dapat memicu terbentuknya aglomerasi perkotaan, yaitu suatu bentuk konsentrasi geografis kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan. Konsentrasi ini terjadi karena kedekatan lokasi yang memungkinkan terjadinya efisiensi atau penghematan biaya, yang dikenal sebagai *economy of proximity* (Kuncoro, 2012). Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dikenal luas sebagai kota pelajar dan kota budaya. Statusnya yang istimewa tidak hanya melekat secara administratif,

tetapi juga tercermin dalam daya tariknya sebagai pusat pendidikan, seni, dan spiritualitas. Kota ini menarik banyak pendatang, baik untuk menetap, berinvestasi, hingga menikmati masa pensiun. Namun, di balik pesona tersebut, tersembunyi persoalan serius terkait tata ruang dan keadilan ekonomi, khususnya dalam hal ketimpangan harga tanah. Masalah ini berdampak signifikan pada kelompok rentan, terutama generasi muda lokal yang semakin sulit memiliki hunian di kampung halamannya sendiri.

Dalam konteks pendidikan, ketimpangan akses terhadap perumahan juga berdampak pada stabilitas dan konsentrasi belajar generasi muda. Kondisi hunian yang tidak layak dapat mengganggu proses belajar dan perkembangan akademik mereka. Hal ini menunjukkan bahwa isu perumahan tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi, tetapi juga berdampak pada sektor pendidikan. Pemerintah telah mencoba mengatasi masalah ini melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) sebagai solusi perumahan bagi keluarga berpenghasilan rendah. Namun, jumlah rusunawa yang tersedia masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat. Seperti halnya pembangunan perumahan dan permukiman di Indonesia, di Kota Yogyakarta masih dihadapkan pada tiga permasalahan pokok, yaitu keterbatasan penyediaan rumah, meningkatnya jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni (RTLH) dan tidak didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai, serta permukiman kumuh yang semakin meluas (Ritohardoyo, 2017).

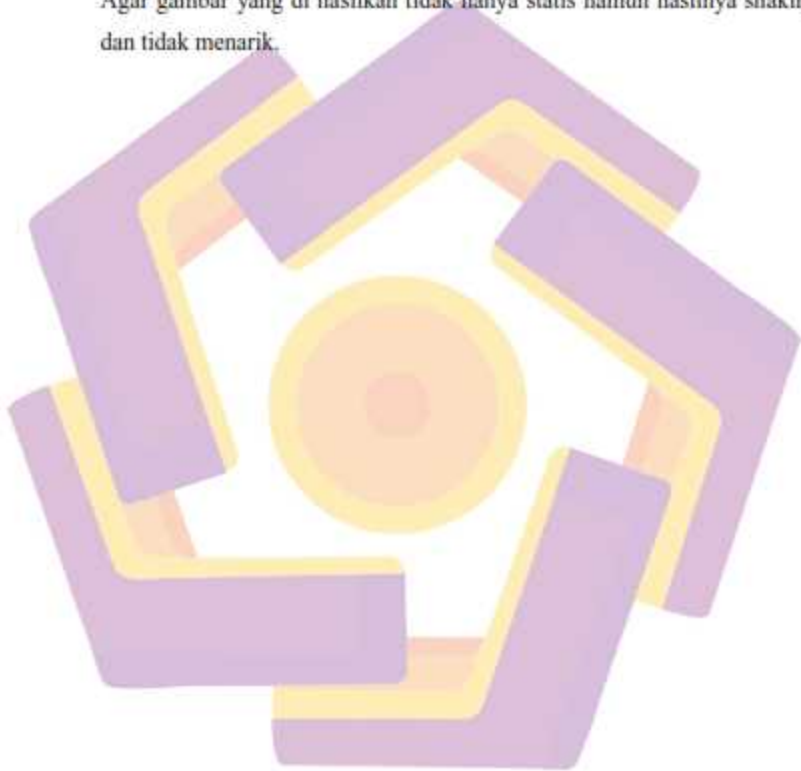
Ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta juga menjadi faktor yang memperparah kesenjangan akses terhadap perumahan. Meskipun memiliki pertumbuhan ekonomi yang kian tinggi, ketimpangan distribusi pendapatan di Kota Yogyakarta merupakan yang tertinggi di Provinsi DIY dan selalu berada di atas angka 0,4. Ini berarti pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Kota Yogyakarta tidak disertai dengan pemerataan

distribusi pendapatan. Menurut (Adisasmita, 2013) menjelaskan bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang berbeda-beda di setiap daerah mencerminkan tingkat kemajuan yang tidak merata antar wilayah. Dengan kata lain, perbedaan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan atau tidak seimbangannya pembangunan antar daerah.

Dalam upaya memahami dan mengkomunikasikan kompleksitas isu ini, pembuatan film dokumenter dapat menjadi media yang efektif. Menurut Robert Flaherty, film dokumenter adalah bentuk karya kreatif yang menyusun realitas dengan pendekatan subjektif, berbeda dari film berita yang hanya merekam fakta apa adanya. Dengan demikian, film dokumenter mencerminkan interpretasi pribadi pembuatnya terhadap kenyataan yang diangkat (Gani, 2019). Film dokumenter memiliki kemampuan untuk menyampaikan realitas sosial secara mendalam dan menyentuh emosi penonton, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan mendorong diskusi publik mengenai isu ketimpangan harga rumah terhadap generasi muda di Yogyakarta. Melalui film dokumenter, berbagai perspektif dapat diangkat, mulai dari pengalaman pribadi generasi muda dalam mencari hunian, pandangan ahli perumahan dan urbanisasi, hingga kebijakan pemerintah terkait perumahan. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan dan solusi yang mungkin untuk mengatasi isu ketimpangan harga rumah di Yogyakarta.

Dalam tulisan ini menguraikan peran penting seorang *Director of Photography (DoP)* dalam proses produksi karya audio visual. *DoP* bertanggung jawab atas aspek visual mulai dari tahap pra-produksi hingga produksi. Tugas utamanya adalah menerjemahkan naskah yang diarahkan oleh sutradara ke dalam bentuk sinematografi. Selain itu, *DoP* juga mengatur komposisi dan *framing* setiap pengambilan gambar, mengelola tim kamera dan pencahayaan, serta memastikan gerakan kamera mendukung alur cerita. Menurut Syafriwaldi (2019), Kendala yang sering

dijumpai ketika produksi meliputi keterbatasan alat yang di gunakan saat produksi, membuat footage yang direkam monoton karena teknik pengambilan yang terbatas di akibatkan oleh kekurangan alat. Adapun teknik yang di gunakan director of photography yaitu teknik hand held. Agar gambar yang di hasilkan tidak hanya statis namun hasilnya shaking dan tidak menarik.



1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat disampaikan bahwa penulis ingin menunjukkan keresahan anak muda, terutama generasi Z dan generasi Y, terkait kepemilikan rumah. Berdasarkan hal tersebut melalui film dokumenter, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi *DoP* dalam meningkatkan narasi pada film dokumenter “Paradoks Tanah Jogja”?

1.3 Tujuan Karya Film Dokumenter

Tujuan dari karya film ini untuk mendeskripsikan strategi *DoP* dalam membangun narasi pada film dokumenter ini. Pembuatan karya visual ini adalah untuk merancang dan mewujudkan konsep visual yang selaras dengan skenario dan alur cerita film dokumenter, sehingga mampu secara efektif menggambarkan keresahan generasi muda terhadap kesulitan kepemilikan rumah di masa depan.

1.4 Manfaat penciptaan karya

1.4.1 Manfaat karya secara akademis

Karya film dokumenter ini memberikan manfaat akademis khususnya dalam konteks ilmu komunikasi. Sebagai bentuk komunikasi visual, dokumenter ini tidak hanya menyampaikan informasi berdasarkan hasil penelitian, tetapi juga membangun pemahaman publik melalui pendekatan naratif dan visual yang menyentuh aspek emosional audiens. Hal ini sejalan dengan tujuan utama ilmu komunikasi, yakni menyampaikan pesan secara efektif kepada khalayak luas.

1.4.2 Manfaat karya secara praktis

Salah satu manfaat praktis yang paling utama dari penciptaan karya ini adalah supaya meningkatnya kesadaran publik terhadap isu ketimpangan ruang dan hunian, yang selama ini kerap luput dari perhatian. Melalui pendekatan visual dan naratif, dokumenter ini

dapat menjelaskan bagaimana generasi muda di Yogyakarta menghadapi tantangan besar untuk memiliki rumah di kota kelahiran mereka sendiri. Pesan yang disampaikan melalui gambar bergerak dan suara memiliki kekuatan emosional yang mampu menjangkau penonton dengan lebih mendalam, sehingga menciptakan pemahaman yang lebih kuat dan menyentuh terhadap realitas yang dihadapi masyarakat.

